

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di tahun 2011 lalu negara Suriah mengalami krisis dalam negeri. Hal tersebut muncul karena adanya gerakan paksaan dari masyarakat agar presiden mereka yang saat itu Presiden Bashar Al Assad untuk turun dari jabatannya. Gerakan yang dilakukan rakyat Suriah ini merupakan bagian dari gelombang peristiwa *arab spring*, yaitu gerakan kudeta atau pengambilalihan kekuasaan negara yang juga terjadi di beberapa wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah untuk berganti pada rezim yang lebih baik¹. Peristiwa *arab spring* ini muncul ke permukaan setelah maraknya protes rakyat Tunisia kepada penegak hukum karena dirasa melakukan hal yang tidak semestinya. Hal yang dimaksud adalah sebuah tindakan represif luar biasa dari aparat penegak hukum terhadap seorang pemuda bernama Muhammad Bouazizi di Provinsi Sidi Bouzid, Tunisia. Yang kemudian Bouazizi membakar dirinya sendiri sebagai bentuk kekecewaan atas rezim saat itu, yang akhirnya membakar semangat masyarakat untuk bebas dari rezim el-Abedine Ben-Ali. Dari sini kemudian muncul aksi - aksi protes yang semakin besar dan meyakinkan hampir seluruh warga Tunisia bahwa presiden mereka yang memalingkan pandangan dari permasalahan tadi merupakan orang yang salah dalam memimpin negara mereka. Yang kemudian berujung pada penurunan jabatan presiden pada saat itu yaitu Zine el-Abedine Ben-Ali².

¹ International Relations. *The Arab Spring*. [online] di <http://internationalrelations.org/the-arab-spring/>, Diakses (29 Desember 2020)

² *Ibid*

Peristiwa yang terjadi di Tunisia ini kemudian menyebar dan mempengaruhi rakyat di negara-negara kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah lainnya, yang kemudian memicu masyarakatnya untuk melakukan gerakan yang sama yang disebut dengan *Tunisian Wind*. Tidak lama waktu berselang, beberapa negara di kawasan Timur Tengah mulai bergejolak, dan salah satunya ialah Suriah³. Gelombang protes yang dilakukan oleh rakyat Suriah dimulai sekitar kuartal pertama tahun 2011 dengan melakukan demonstrasi, Namun respon represif dari aparat penegak hukum yang mengakibatkan tewasnya empat demonstran pada 18 Maret 2011 semakin membuat keadaan menjadi semakin tidak kondusif⁴. Kemudian pada bulan Juli kelompok demonstran membuat sebuah organisasi paramiliter yang bernama *Free Syrian Army* singkatnya (FSA) sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Suriah. Pemimpin FSA adalah Riad Al-Assad yang tidak lain merupakan mantan kolonel militer Suriah sendiri. Tidak berhenti disitu banyak mantan petinggi dan pejabat tentara Suriah yang ikut bergabung dalam FSA⁵. Semenjak saat itu banyak aksi saling serang antara FSA dengan tentara pasukan pemerintah Suriah.

Pergolakan yang terjadi selanjutnya berubah semakin rumit dan kompleks dengan masuknya aktor - aktor baru dalam konflik pemerintah Suriah dengan FSA ini, baik aktor negara maupun non negara⁶. Aktor - aktor ini diantaranya ialah, Iran, Rusia, Tiongkok dan Hizbullah yang mendukung presiden Bashar Al-Assad. Disini yang berlawanan terdapat Amerika Serikat yang berkoalisi dengan Inggris dan Perancis, Turki serta negara-negara yang tergabung dalam *Arab League* memiliki berada di kelompok sama yang ingin menggulingkan Presiden Bashar AL-

³ *Ibid.*

⁴ Independent. 2016. *Syrian civil war timeline: Tracking five years of conflict* [online] dari <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syrian-civil-war-timeline-tracking-five-years-of-conflict-a6929411.html>, diakses (5 Januari 2021)

⁵ *Ibid*

⁶ Stanford. *International Security in a Changing World The Syrian Civil War: A Cheat Sheet* . [online] di <https://web.stanford.edu/~imalone/Teaching/ps1/SyriaCivilWarCheatSheet.pdf>, diakses (2 Januari 2021)

Assad. Kelompok oposisi yang awalnya hanya *Free Syrian Army* kemudian diiringi dengan kelompok paramiliter lainnya diantaranya adalah *Suthern Front Forces*, *Army of Islan*, *AL-Nusrah* dan *Kurdish Forces*. Ditambah lagi masuknya aktor baru pada konflik Suriah yakni kelompok yang sedang *viral* pada saat itu, yakni ISIS (*Islamic State in Iraq and Syria*).

Konflik yang dimulai sejak awal tahun 2011 ini menyebabkan kerugian besar di sektor ekonomi negara Suriah, diperkirakan kerugian yang dialami hingga \$275,000,000,000 (275 miliar dollar amerika). Jika diteruskan hingga 2017 kerugaian ekonomi yang dialami dapat menembus angka \$1,300,000,000,000 (1,3 triliun dollar)⁷. Selain itu dampak dari konflik ini adalah tingginya korban jiwa yang dialami. Menurut SAMS (*Syrian-American Medical Society*) terdapat 1.500 orang tewas dan 15.000 orang terluka akibat 161 serangan senjata kimia selama konflik⁸. Akibat konflik yang berkepanjangan ini, rakyat Suriah dipaksa untuk mengungsi keluar dari Suriah. Dari data yang di unggah oleh SCPR (*Syrian Centre for Policy Reaserch*), tercatat setidaknya terdapat 6.000.000 jiwa rakyat Suriah yang mengungsi.

Dari banyaknya aktor yang ikut terlibat dalam konflik Suriah, Iran merupakan salah satu aktor yang terlibat cukup banyak bahkan sejak awal terjadinya konflik daripada kebanyakan aktor eksternal lainnya. Meninjau dari keterlibatan masing - masing aktor yang berkecimpung dalam konflik Suriah, Iran merupakan negara yang disebut-sebut sebagai negara yang bertanggung jawab atas banyaknya korban khususnya masyarakat sipil selama konflik

⁷ Nils Nimmermann. 2016. *The Syrian war's astronomical cost*. [online] di <http://www.dw.com/en/the-syrian-wars-astronomical-cost/a-19111529>, Diakses (20 Februari 2021)

⁸ Raziye Akkoc. 2016. *What has been the real cost of Syria's civil war?*. [online] di <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/12146082/What-has-been-the-real-cost-of-Syrias-civil-war.html>, Diakses (19 Januari 2021)

berlangsung⁹. Karena memang sejak awal terjadinya konflik pada tahun 2011 Iran telah melakukan berbagai upaya dan usaha untuk membantu Presiden Bashar AL-Assad untuk membendung pergolakan pemberontakan oposisi. Upaya yang dilakukan oleh Iran seperti, memasok persenjataan tentara Suriah untuk menghentikan pergerakan kelompok oposisi yang pada akhirnya dianggap banyak menimbulkan korban sipil. Selain itu Iran juga memberikan bantuan intelijen berupa pemberian informasi, melakukan pelatihan militer baik untuk tentara Suriah maupun untuk kelompok paramiliter Hizbullah yang mendukung Pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad, Tidak berhenti disitu saja, bahkan Iran juga mengirim pasukan khusus militernya yang bernama IRGC (*The Islamic Revolutionary Guard Corps*) ke Suriah untuk terjun langsung dalam membantu mempertahankan pemerintahan Bashar Al-Assad¹⁰.

Karena kegigihan negara Iran membantu mempertahankan Pemerintahan Bashar Al-Assad, Iran diperkirakan menghabiskan banyak sekali biaya, Menurut juru bicara *U.N special envoy for Syria* Staffan de Mistura, diperikarakan bahwa Iran harus mengeluarkan biaya setidaknya sebesar \$6,000,000,000 (6 Miliar dollar) setiap tahunnya hanya untuk memberikan bantuan kepada pemerintahan Bashar Al-Assad. Sedangkan berdasarkan analisis dari Nadim Shehadi sebagai Direktur *Fares Center for Eastern Mediterranean Studies* dari Tufts University, Iran telah menghabiskan sekitar \$14,000,000,000 (14 Miliar dollar) hingga \$15,000,000,000 (15 miliar

⁹ Al-Jazeera. 2016. *Why is Iran backing Syria's Bashar al-Assad?*. [online] di <http://www.aljazeera.com/programmes/upfront/2016/12/iran-backing-syria-bashar-al-assad-161202082853119.html>, Diakses (20 Februari 2021)

¹⁰ Will Fulton, Joseph Holliday dan Sam Wyer. 2013. *Iranian Strategy in Syria* [online] di <http://www.understandingwar.org/sites/default/files/IranianStrategyinSyria-1MAY.pdf>, Diakses (5 Januari 2021)

dollar) untuk memberikan bantuan ekonomi serta bantuan militer untuk pemerintah Bashar AL-Assad dari tahun 2012 hingga tahun 2013¹¹.

Keseriusan dan kegigihan negara Iran untuk membantu pemerintahan Bashar Al-Assad dapat dilihat dari betapa besar bantuan dan biaya yang mereka keluarkan untuk mempertahankan pemerintahan Bashar Al-Assad sebagai entitas yang berkuasa di negara Suriah. Keseriusan ini malah menempatkan Iran pada posisi yang kurang bagus, mengingat selama ini Iran telah mendapat sanksi internasional yang berusaha melemahkan perekonomian Iran. Bahkan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama pada saat itu, sempat berbicara bahwa kekayaan Iran sebesar \$150,000,000,000 (150 Miliar dollar) sedang ditahan oleh bank luar negeri. Jika “bantuan” Iran kepada Suriah terus berlanjut maka mungkin akan berdampak negatif pada perekonomian Iran¹²

Selain menguras banyak uang untuk memberikan bantuan secara finansial, militer, maupun secara medis, dalam kacamata negara Iran keterlibatan negaranya dalam konflik Suriah juga mengakibatkan banyaknya korban jiwa dari pasukan militer Iran yang langsung dikirim untuk membantu tentara Suriah. Telah tercatat bahwa, dari awal keterlibatan militer Iran dalam Konflik Suriah pada tahun 2011 hingga tahun 2016, diperkirakan terdapat hampir 1000 pasukan Iran tewas dalam pertempuran Suriah¹³. Diantara banyaknya personil militer yang tewas terdapat beberapa tokoh militer Iran. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, terdapat dua tokoh militer Iran

¹¹ Eli Lake. 2015. *Iran Spends Billions to Prop Up Assad*. [online] di <https://www.bloomberg.com/view/articles/2015-06-09/iran-spends-billions-to-prop-up-assad>, Diakses (20 Februari 2021)

¹² *Ibid.*

¹³ Bozorgmehr Sharafedin. 2016. *Death toll among Iran's forces in Syrian war passes 1,000*. [online] di <http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-iran-idUSKBN13H16J>, Diakses (8 Agustus 2021)

yang tewas di pertempuran Suriah ini, yakni, Brigadir Jenderal Reza Khavari dan Jenderal Hossein Hamdani¹⁴.

Yang cukup menarik dari konflik Suriah ini adalah *standing position* yang diambil negara Iran yakni, memberi *full support* kepada pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad dengan segala upaya yang bisa diambil. Hali ini berbanding terbalik dengan sikap negara Iran yang selama ini ditunjukkan dalam merespon konflik - konflik sebelumnya yang terjadi di beberapa Negara Arab lainnya yang selalu mendukung kelompok oposisi.¹⁵

Keseriusan Iran dalam membantu pemerintahan Bashar Al-Assad bukan tanpa sebab melainkan karena mengingat negara Suriah selama ini merupakan satu - satunya sekutu Iran yang ada di Timurnengah. Maka tidak heran jika Iran berusaha mati - matian untuk mempertahankan pemerintahan Bashar al-Assad agar hubungan mereka tetap terjalin. Mengingat persahabatan negara Iran dan Suriah sudah terjalin sejak tahun 1970 saat keduanya diisolasi oleh negara-negara Barat selama tiga tahun¹⁶. Salah satu faktor yang menjaga hubungan erat antara Iran dan Suriah hingga saat ini adalah sikap keduanya yang keras menentang pengaruh Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sikap keduanya tersebut dapat tercermin diantaranya melalui upaya keduanya memberikan pendanaan terhadap Hamas di Palestina yang selama ini berkonflik dengan Israel yang merupakan sekutu Amerika Serikat. Maka dari itu, Iran terus berusaha untuk mempertahankan pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad.

¹⁴ Al-Jazeera. 2015. *Iranian influence in Syria: At what cost?*. [online] di <http://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2015/10/iranian-influence-syria-cost-151029203537347.html>, Diakses (20 Februari 2021)

¹⁵ Jubin Goordazi. 2013. *Iran and Syria at the Crossroads: The Fall of the Tehran-Damascus Axis*. [online] di https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/iran_syria_crossroads_fall_tehran_damascus_axis.pdf, Diakses (5 Januari 2021)

¹⁶ Mona Yacoubian. 2007. *Syria's Alliance with Iran*. [online] di <https://www.usip.org/publications/2007/05/syrias-alliance-iran>, Diakses (9 November 2021)

Tidak hanya untuk kepentingan negara saja Iran membantu pemerintahan Bashar Al-Assad melainkan juga untuk mempertahankan nilai - nilai agama khususnya ajaran Islam *Syiah*. Sudah tidak asing bahwa kedua negara ini memegang kuat nilai - nilai agamanya karena pengaruh revolusi yang terjadi pada tahun 1979 lalu. Revolusi ini terjadi antara kelompok *pan-islamist* yang dipimpin oleh Ayatulloh Khomeini dan kelompok *pan-modernism* yang berada dibawah rezim Pahlevi.¹⁷ Dan karena revolusi ini negara Iran mengalami sedikit banyak pergeseran identitas.

Sebelum revolusi 1979 terjadi negara Iran tidak terlalu menonjolkan nilai - nilai Islam *syiah* namun kemudian setelah revolusi terjadi nilai - nilai Islam *Syiah* mejadi pertimbangan hukum yang sangat penting ditambah lagi Ayatulloh Khomeini sendiri merupakan ulama Islam *Syiah* terkemuka yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat Iran. Salah satu pandangan Khomeini yang sampai saat ini masih bertahan ialah negara Amerika Serikat merupakan musuh besar umat islam karena telah melakukan imperialisme.¹⁸ Hal ini merupakan titik balik bagi negara Iran yang semula berhubungan baik dengan Amerika Serikat justru berbalik menjadi musuh yang harus ditumpas. Dengan begitu dapat dipahami bahwa nilai - nilai Islam *Syiah* menjadi sangat berpengaruh terhadap perilaku negara Iran.

Hingga saat ini, pengaruh nilai - nilai Islam *Syiah* di Iran tetap terjaga dan memberikan pengaruh pada kebijakan Iran. Pengaruh ajaran Islam *Syiah* pada negara Iran sangat kental terhadap pengambilan kebijakannya yang menggunakan konsep *wilayah al-faqih* pada setiap pengambilan keputusannya.¹⁹ Konsep *wilayah al-faqih* adalah pemikiran yang diperkenalkan

¹⁷ Hossein Karimifard.2012. *Constructivism, National Identity and Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran*. [online] di <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/viewFile/14631/9997>, Diakses (18 Oktober 2021)

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*.

oleh lagi - lagi Ayatulloh Khomeini, yakni konsep mengenai sistem pemerintahan yang menempatkan seorang ulama sebagai pemimpin tertinggi. Penggunaan konsep ini pada sistem pemerintahan adalah untuk mempertahankan kaedah kaedah islami pada seluruh pengambilan kebijakan negara Iran.

Melalui penjelasan diatas dapat dilihat bagaimana keterlibatan Iran dalam konflik Suriah yang cukup besar. Dari keterlibatannya tersebut pula terlihat adanya perbedaan dari sikap Iran pada konflik Suriah dibandingkan pada konflik-konflik lainnya. Maka penulis dalam penelitian ini akan menggunakan konsep budaya strategis untuk melihat apa yang mendasari Iran untuk bersikap berbeda dalam konflik Suriah. Dari penjelasan sebelumnya juga dituliskan mengenai begitu besarnya pengaruh nilai-nilai ajaran *Syiah* di Iran pasca revolusi 1979 yang bertahan hingga saat ini. Maka penulis akan berfokus pada nilai Islam *Syiah* sebagai nilai dominan di Iran yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan Iran termasuk dalam kebijakan Iran pada konflik Suriah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran budaya strategis Iran dalam konflik Suriah tahun 2011-2016?”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui budaya strategis dalam kebijakan Iran pada Konflik Suriah tahun 2011-2016.
2. Untuk mengetahui bentuk dan nilai yang terdapat dalam ajaran Islam *Syiah* sebagai budaya strategis Iran.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai bagaimana seharusnya pengambilan kebijakan negara terkait budaya strategis suatu negara dalam merespon negara yang sedang berkonflik, dalam kasus ini adalah bagaimana peran negara Iran membantu negara Suriah menangani konfliknya. Selain itu penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai tujuan dari pengambilan kebijakan tersebut.

1.4.2 Secara Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam memberikan pemahaman tentang alasan pengambilan kebijakan dan budaya strategis Iran terhadap konflik Suriah. Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan wawasan atas kondisi kedua negara pada saat konflik berlangsung.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Peringkat Analisis

Dalam kacamata hubungan internasional, untuk memahami suatu peristiwa dapat dianalisis melalui beberapa tingkatan dalam suatu kajian yaitu sistem internasional, domestik dan individu. Yang pertama kajian sistem internasional yakni pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi politik, ekonomi, aliansi antar negara dan organisasi internasional apa saja yang terlibat dengan negara yang diteliti. Kemudian ada kajian

domestik, pendekatan yang berfokus pada instrumen dalam negara seperti, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, *national interest*, partai politik dan budaya strategisnya. Dan yang ketiga pendekatan secara individu yang berputar pada kajian kegiatan perorangan, mulai dari masa kecil, kepribadian, lingkungan kehidupan, pendidikan hingga pergaulan individu yang sedang diteliti serta yang tidak kalah penting gaya kepemimpinan yang ditunjukkan.²⁰

Menurut Rourke, dalam hubungan internasional kita dapat mengkaji suatu peristiwa dalam tiga tingkatan yakni, *individual-level-analysis* yang berasumsi bahwa seorang individu merupakan spesies berakal yang dapat berperan merumuskan suatu kebijakan. Setelah itu ada *State-level analysis* yang berfokus pada suatu pemerintahan negara atau organisasi setingkat negara yang dapat mempengaruhi kebijakannya suatu negara. Kemudian ada *System-level analysis* yang berperan sebagai tekanan atau *catalyst* untuk mempengaruhi kebijakan suatu negara²¹.

Dari penjelasan diatas, penulis akan menggunakan tingkat analisa (*level of analysis*) *State-level* karena dalam penelitian ini yang menjadi fokusnya adalah bagaimana budaya strategis negara Iran berperan dalam konflik negara tetangganya yakni Suriah. Penulis juga menganalisis faktor - faktor serta proses - proses yang menjadi pertimbangan pemerintah negara Iran, salah satunya adalah aliran Islam Syiah yang kembali menjadi pengaruh besar dalam pengambilan kebijakan negara Iran.

²⁰ Marijke Breuning. 2007. "*Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*". Palgrave Macmillan: New York. Vol. XVII, Number 3, pp. 179.

²¹ Cristophe Barbier. "*Chapter Three on 'Levels of Analysis and Foreign Policy.'*". [online] di https://www.academia.edu/28941706/Chapter_Three_on_Levels_of_Analysis_and_Foreign_Policy. Diakses (8 Desember 2021)

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1 *Constructivism*

Constructivism merupakan salah satu teori hubungan internasional yang digunakan sebagai pendekatan untuk memahami suatu peristiwa. Teori ini ada karena rasa tidak puas para pakar dan pelajar pada teori pendekatan sebelumnya yakni, *neo-realism* dan *liberalism* yang dianggap gagal atau kurang dalam menjelaskan perkembangan terakhir mengenai *balance of power*. *Neo-realism* percaya dalam kajian *balance of power* untuk mengimbangi negara dengan *great power* harus ada negara *super power* lain untuk mengimbangi kekuatan negara *great power* tadi. Negara dengan *great power* yang dimaksud ialah negara Amerika Serikat, dengan mengimbangi kekuatan Amerika Serikat keamanan negara dunia dapat terjamin, Namun hal ini tidak terwujud setelah perang dingin selesai. *Constructivism* berpendapat bahwa *neo-realism* terlalu melihat secara empiris dan bahkan materialis dan mengesampingkan ide yang banyak dapat menjelaskan keseimbangan kekuatan oleh pendekatan *constructivism*. Dan juga beberapa kaum terpelajar pemikir liberalisme sepakat dengan asumsi neorealisme yang dikritik oleh konstruktivisme. Adapula yang mulai melihat peran ide, namun ide yang menjadi fokus adalah ide liberal²².

²² Robert Jackson & Jack Sorensen. *Introduction to International Relations Theories and Approach*. (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 210.

Ada tiga aspek yang dipelajari dalam *constructivism*. Yang pertama ada, *intersubjective understanding* (gagasan bersama).²³ Konstruktivisme percaya bahwa politik tingkat global selama ini sangat dipengaruhi oleh adanya ide, asumsi ataupun nilai yang dipahami dan dimiliki oleh aktor - aktor yang ada didalamnya secara intersubjektif. Menurut konstruktivisme dalam aspek *intersubjective understanding* mempercayai bahwa ide merupakan hal yang lebih berpengaruh dalam pengambilan kebijakan dibandingkan material yang menjadi fokus pada pemahaman neorealisme. Melalui aspek intersubjektif ini konstruktivisme kemudian dapat menjelaskan bahwa ide atau nilai yang dipegang oleh suatu aktor dapat mempengaruhi pembentukan perilaku atau bahkan pembatasan perilaku.

Aspek yang kedua membahas tentang hubungan struktur ide dan perilaku. Konstruktivisme menilai bahwa struktur internasional tidak dapat berpengaruh langsung terhadap perilaku suatu aktor, namun wujud ideasional yang ada didalamnya akan membentuk (*constitutive*) dan mengatur (*regulative*) perilaku dan aksi.²⁴ Selain itu konstruktivisme percaya bahwa susunan ideasional juga dapat berpengaruh terhadap kepentingan maupun identitas yang dimiliki oleh aktor tersebut.

Aspek ketiga berbicara tentang bagaimana hubungan antara aktor itu sendiri dengan struktur ideasionalnya. Konstruktivisme meyakini bahwa aktor dan struktur ideasionalnya saling mempengaruhi satu sama lain. Ide dan struktur ide tidak hanya mampu mempengaruhi aktor untuk mengidentifikasi siapa dirinya namun juga dapat

²³ Dale C. Copeland. 2000. *The Constructivism Challenge to Structural Realism*. [online] di <http://www3.nccu.edu.tw/~lorenzo/Copeland.pdf>, Diakses (9 November 2021)

²⁴ *Ibid.*

memproduksi struktur ide yang baru atau merubah yang sudah ada dalam upaya aktor untuk membentuk identitas dan kepentingannya.²⁵

Konstruktivisme memiliki tokoh yang berpengaruh bernama Alexander Wendt dalam perkembangannya. Alexander Wendt melihat perdebatan antara kaum terpelajar paham neorealis dengan neoliberal mengenai pola hubungan antar aktor dalam hubungan internasional. Namun dalam perdebatannya, kedua pendekatan ini memiliki pandangan yang sama, bahwa identitas serta kepentingan yang dimiliki oleh aktor merupakan sesuatu hal yang muncul secara alami tanpa pengaruh apapun (*given*). Perdebatan kembali muncul, apakah hubungan antar aktor dalam hubungan internasional didasari oleh struktur yang telah ada menurut neorealis, ataukah didasari oleh adanya proses, interaksi maupun pembelajaran oleh sebuah institusi menurut neoliberalisme.²⁶

Dari melihat perdebatan yang terjadi, Wendt berpikir bahwa identitas maupun kepentingan yang dimiliki oleh suatu aktor merupakan hal yang muncul secara *intersubjective* dari peristiwa yang terjadi antara aktor. Berlawanan dengan pemikiran neorealisme dan neoliberalisme yang mengatakan identitas dan kepentingan aktor adalah hal yang *given*. Dari sini sudah terlihat bahwa menurut Wendt identitas dan kepentingan merupakan hasil dari bentukan proses interaksi yang telah dilakukan antar aktor, bukan terjadi secara alamiah tanpa ada interaksi.²⁷ Karena dengan iteraksi - interaksi itu aktor dapat mendefinisikan siapa dan apa yang ingin meraka capai.

Pemikiran Wendt mengenai identitas serta kepentingan suatu aktor, mendasari kritiknya atas neorealisme yang berargumen tentang sistem anarki yang ada di dunia

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Robert Jackson & Jack Sorensen. *Op.Cit.*hal.216.

²⁷ *Op.Cit.*

internasional. Wendt menolak pandangan neorealisme yang berpendapat bahwa sifat dasar yang dimiliki aktor adalah alamiah dalam sistem internasional yang anarki.²⁸ Karena kembali lagi pada pemikiran Alexander Wendt bahwa identitas dan kepentingan aktor bukan sesuatu yang *given*, maka tidak mungkin tercipta *security dilemma* tanpa adanya interaksi antar aktor. Dengan begitu Alexander Wendt menilai bahwa sistem yang anarki bukan sesuatu yang alamiah melainkan hasil dari pemikiran serta tindakan masing-masing aktor²⁹

Tidak berhenti disitu Alexander Wendt terus mempengaruhi perkembangan perspektif *constructivism* dengan berbagai macam pemikirannya. Hingga akhirnya pemikiran Wendt mempengaruhi kajian para peneliti *strategic culture* (budaya strategis). Wujud pemikiran Wendt yang disetujui oleh para peneliti budaya strategis ialah pemikiran Wendt mengenai identitas dan kepentingan aktor terbentuk melalui konstruksi sosial dari pengetahuan yang dipahami aktor. Selain itu pandangan Wendt terkait *intersubjective* yang mengakomodasi nilai, norma serta budaya yang sebelumnya dianggap abstrak dan kemudian menjadi hal yang cukup penting dan dapat dijelaskan juga disepakati oleh pemikir budaya strategis.³⁰ Pemikiran Alexander Wendt dianggap efektif pada kajian budaya strategis terutama tentang konstruksi pengetahuan suatu aktor dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Maka kemudian para pengkaji budaya strategis menerapkan pemikiran tersebut lalu memasukan unsur-unsur budaya seperti

²⁸ *Op.Cit.*

²⁹ *Op.Cit.*

³⁰ Jeffrey S. Lantis. *Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism*. Dalam: Jennie L. Johnson, Kerry M. Kartchner and Jeffrey A. Larson. *Strategic Culture And Weapons of Mass Destruction* (New York: Palgrave Macmillan, 2009) hal.36.

nilai, norma, dan lain sebagainya kedalam kumpulan pengetahuan yang dapat mempengaruhi aktor dalam membuat sebuah kebijakan.

1.5.2.2 Budaya Strategis

Budaya strategis merupakan kajian dalam ilmu hubungan internasional yang menjawab atas ketidakmampuan rasionalisme dan *game theory* dalam menjelaskan perilaku suatu negara yang beragam. Berdasarkan tulisan Jeffrey S. Lantis yang berjudul *Strategic culture: From Clausewitz to Constructivism*, perkembangan kajian budaya strategis dapat dibagi menjadi tiga generasi yang bermaksud tiga fase perkembangan. Generasi paling awal ditandai dengan kemunculan buku yakni pertama ditandai dengan kemunculan Jack Synder melalui tulisannya yang berjudul *The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations* tahun 1977 yang ditulis oleh ilmuwan politik bernama Jack Snyder.³¹

Dalam tulisannya tersebut, Snyder mengaplikasikan kerangka budaya startegis untuk menginterpretasikan perkembangan doktrin nuklir antara Uni Soviet dan Amerika Serikat sebagai hasil dari konteks organisasi, sejarah maupun politik yang berbeda.³² Kemudian Pada tahun 1981 muncul guru besar Colin Gray yang mengatakan bahwa perbedaan perilaku negara disebabkan pengalaman sejarah yang berbeda juga, seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memiliki sejarah yang berbeda. Colin Gray menyimpulkan bahwa budaya strategis merupakan cara berpikir dan bertindak yang didasari persepsi terhadap sejarah atau presepsi terhadap diri sendiri.

³¹ *Ibid.*hal.35.

³² *Ibid.*

Generasi pertama perkembangan kajian budaya strategis hanya memfokuskan diri pada hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya pemilik senjata nuklir. Snyder dan Gray mengamati bahwa budaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan sebuah negara dan budaya tersebut akan disebarkan ke masyarakatnya. Seperti kajian baru pada umumnya, pada saat itu budaya strategis juga mendapat banyak kritik diantaranya adalah terkait operasionalisasi budaya strategis dan subjektivitasnya.³³

Kemudian sekitar pertengahan tahun 1980-an lahirlah generasi kedua perkembangan budaya strategis. Setelah fokus pada hubungan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dalam fase atau generasi pertama, sekarang perkembangan kajian budaya strategis mengacu pada pengaruh pemimpin suatu negara dalam pengambilan kebijakan luar negeri suatu aktor. Budaya strategis mengamati bahwa simbol budaya yang telah melekat pada aktor pembuat kebijakan pasti akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negerinya sendiri. Namun hal ini masih memunculkan kritik pada kajian budaya strategis bahwa pendapatnya masih dirasa terlalu subjektif.³⁴

Kajian budaya strategis semakin mengalami perkembangan seiring waktu berjalan, ditambah lagi dengan munculnya perspektif *constructivism* dalam *international studies* sekitar tahun 1990-an.³⁵ terdapat satu tokoh pemikir konstruktivisme yang berpendapat bahwa kepentingan atau identitas yang muncul di satu negara dapat dilihat dari konstruksi sosial yang berkembang disuatu negara. Sedangkan bagi Peter Katzenstein, Robert Keohane, dan Stephen Krasner lebih melihat pentingnya intersubjektivitas yang

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hal.36.

didalamnya terdapat norma, budaya, identitas, dan ide yang telah ada pada negara ataupun ada karena hubungan antar negara secara umum. Namun berbeda dengan Ted hopf yang memandang bahwa ciri khas suatu negara seperti budaya dan politiknya akan sangat berpengaruh terhadap identitas suatu negara dan perilakunya dalam politik global.

Kemudian fase terakhir, generasi ketiga dimulai pada kemunculan tokoh yang bernama Alastair Iain Johnston yang memiliki tulisan terkenal berjudul *Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History*.³⁶ Pada tulisan tersebut Johnston memilih era dinasti ming untuk menguji metodenya. Johnston menggunakan metodologi pemecahan variabel dependen dan independen. Johnston menentukan orientasi budaya masyarakat tiongkok sebagai variabel independen dan startegi militer mereka pada saat itu sebagai variabel dependennya.

Pada generasi ketiga ini, lebih mengacu pada bagaimana pengaruh dari nilai, norma, kepercayaan dan simbol negara atau masyarakat terhadap kebijakan suatu negara.³⁷ Dari hal tersebut kemudian membentuk batasan pilihan rasional dari suatu aktor dalam pembuatan kebijakannya. Setiap negara memiliki nilai, norma ataupun simbol tersendiri, yang menjadikan sebuah negara unik, dari keunikan ini terbentuk pula kebijakan yang unik dan berbeda dengan negara lain. Karena perbedaan keunikan tadi, yang dianggap rasional oleh suatu negara belum tentu rasional bagi negara lain.

Dari penjabaran diatas, dapat dipahami bahwa budaya strategis juga telah melalui banyak perkembangan, hingga tiga generasi. Yang mana dari masing masing generasi memiliki tokoh terkemukanya masing masing. Karena banyaknya tokoh yang membahas

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.hal.37.*

tentang budaya strategis ini akhirnya pada tahun 2005/2006 diadakan sebuah *workshop* yang bertema *Comparative Strategic Culture* untuk memantapkan definisi budaya strategis itu sendiri.

Dalam lokakarya tersebut menghasilkan satu definisi besar tentang budaya strategis yakni:

*“Shared beliefs, norms, traditions, assumptions, and styles of behavior, originated from common experiences and accepted narratives (both oral and written), that shape collective identity and relationships to other groups, and which determine suitable ends and means for attaining security objectives”*³⁸

Melalui definisi tersebut dapat dimaknai bahwa budaya strategis merupakan bentuk dari kepercayaan, norma, tradisi, asumsi, serta pola perilaku yang didapat dari pengalaman bersama dan diterima secara naratif yang mampu untuk mempengaruhi strategi keamanan suatu negara. Karena setiap negara memiliki kepercayaan, norma, tradisi atau kebiasaan yang berbeda, berpengaruh pula pada perbedaan kebijakan ataupun strategi keamanan yang dibuat oleh tiap negara³⁹.

Sebagai upaya untuk mengembangkan kajian maupun teori budaya strategis, Jeffrey S. Lantis juga menambahkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat membentuk budaya strategis suatu negara⁴⁰. Profesor universitas Wooster ini mengatakan ada tiga aspek yang dapat membentuk budaya strategis yaitu, politik, sosial budaya dan aspek fisik (kondisi empiris negara). Lantis mengatakan yang termasuk dalam aspek politik ialah, pengalaman sejarah, sistem politik, *elite belief* dan organisasi militer. Dalam

³⁸ *Ibid.*, hal. 39.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 40.

aspek sosial budaya faktor pembentuk budaya strategis meliputi mitos, simbol, dan *defining text*. Yang terakhir ada aspek fisik yang dapat mempengaruhi pembentukan budaya strategis, faktor-faktornya meliputi letak geografis, iklim sumber daya alam, perubahan generasi serta teknologi. Untuk mempermudah pemahaman mari kita simak tabel dibawah:

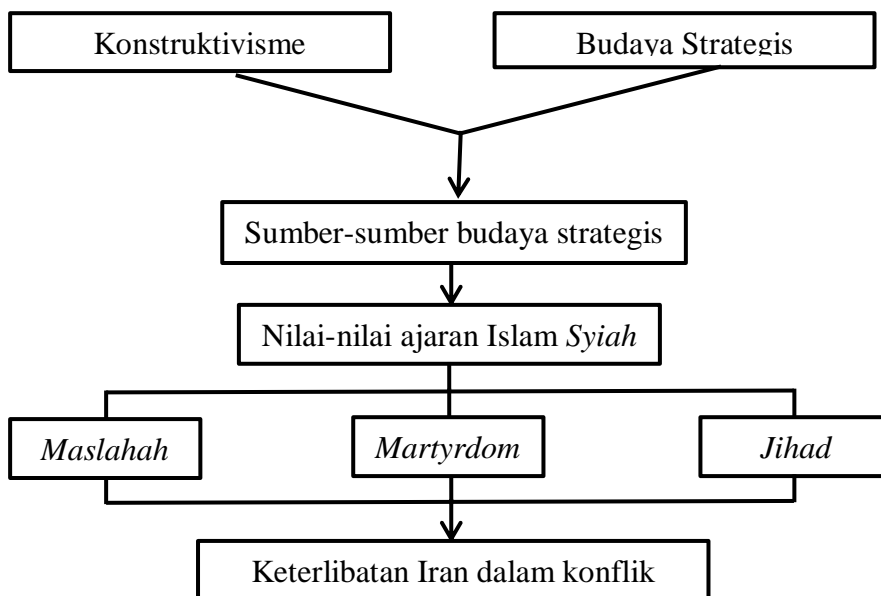
Tabel 1.1 Sumber budaya strategis menurut Jeffrey S. Lantis

Physical	Political	Social/Culture
Geography	Historical experience	Myths and symbols
Climate	Political system	Defining texts
Natural resources	Elite beliefs	
Generational change	Military organizations	
Technology		
(-----Transnational Normative Pressure-----)		

1.5.2.3 Sintesa Pemikiran

Untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian, penulis membuat alur pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran



Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua landasan teori yakni teori *Constructivism* dan Budaya Strategis untuk menganalisis keterlibatan negara Iran pada konflik Suriah. Dalam Konstruktivisme dan Budaya Strategis salah satu faktor yang dipercayai sangat mempengaruhi aktor untuk mengambil keputusan adalah sumber sumber budaya yang dianut oleh aktor. Dalam penelitian ini sumber sumber budaya yang dianut dan dimiliki oleh negara Iran ialah sumber budaya agama Islam. Setelah mempelajari sumber budaya Islam penulis mengetahui bahwa ternyata negara Iran merupakan negara Islam yang beraliran Syiah yang memiliki semangat besar untuk membantu sesama umat muslim Syiah. Bantuan yang diberikan oleh negara Iran juga berdasarkan tiga nilai Syiah yang sudah turun temurun yakni, *Martyrdom*, *Jihad* dan *maslahah* yang kemudian menjadi kunci atas keterlibatan negara Iran dalam membantu rezim Bashar Al – Assad.

1.5.2.4 Hipotesis

Berdasarkan penjabaran yang telah dilakukan sebelumnya, membentuk sebuah argumen utama bahwa kebijakan Iran terlibat dalam konflik Suriah dengan mendukung pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad dipengaruhi oleh budaya strategis Iran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam *Syiah* yang terdapat di Iran. Adanya pengaruh nilai-nilai ajaran Islam *Syiah* tercermin dari adanya unsur-unsur dari nilai *martyrdom*, *maslahah*, dan *jihad* yang ada dalam keterlibatan Iran dalam konflik Suriah.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Dari tulisan Willys Stanley yang berjudul *Iranian Strategic Culture and Its Persia Origins*, penulis mengetahui keberadaan nilai-nilai ajaran Islam *Syiah* di Iran. Hal tersebut tidak lepas dari masyarakat muslim Iran yang memang mayoritas menganut ajaran *Syiah*. Dari besarnya pengaruh ajaran Islam *Syiah* di Iran, Willis Stanley berpendapat bahwa nilai-nilai ajaran Islam *Syiah* telah menjelma menjadi budaya strategis Iran. Sebagai bentuk dari budaya strategis yang dimiliki Iran, Willys Stanley menyebutkan bahwa terdapat tiga nilai ajaran Islam *Syiah* yang berpengaruh terhadap kebijakan Iran. Nilai-nilai tersebut diantaranya yaitu nilai *masalahah*, *martyrdom* dan *jihad*⁴¹.

Maslahah dalam Agama Islam secara umum sering diartikan sebagai upaya untuk memperoleh manfaat serta menghindari sesuatu yang merugikan dan berbahaya⁴². Bagi Stanley, nilai *maslaha* diartikan pula sebuah tindakan yang dilakukan oleh Iran harus berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan bersama⁴³. Dari keterlibatan Iran dalam konflik Suriah, tindakan yang dapat dilihat sebagai bentuk dari nilai *masalahah* adalah upaya-upaya damai Iran untuk menghentikan konflik yang terjadi di Suriah tanpa melalui pertempuran, yakni dengan melalui jalur diplomatis.

Nilai selanjutnya, yaitu *martyrdom* yang dapat diartikan sebagai tindakan pengorbanan yang dilakukan untuk agama. *Martyrdom* atau yang dapat diartikan sebagai sebuah “kesyahidan” merupakan bentuk penghormatan yang tinggi terhadap pengorbanan seseorang

⁴¹ Willis Stanley. *Op.Cit*.hal.152.

⁴² Tariq Ramadan.2016. *Al-Maslahah (The Common Good)*. [online] di <https://tariqramadan.com/english/al-maslaha-the-common-good/>, Diakses (11November 2021)

⁴³ *Loc.Cit*.

untuk agama⁴⁴. Dalam kasus keterlibatan Iran dalam konflik Suriah, bentuk dari nilai *martyrdom* adalah sikap dari masyarakat Iran yang secara sukarela untuk turut bertempur di Suriah untuk melawan kelompok oposisi Suriah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang bahwa Iran dalam konflik Suriah telah mengirimkan pasukannya *Islamic Revolution Guards Corps (IRGC)*, untuk membantu pasukan pemerintah Suriah⁴⁵.

Nilai terakhir yang ada di Iran adalah *Jihad*. *Jihad* selama ini memiliki banyak interpretasi. Interpretasi yang sering muncul adalah sebagai perang suci untuk melawan musuh-musuh Islam⁴⁶. Bagi Iran sendiri, nilai-nilai jihad lebih diartikan sebagai upaya dari negara Iran untuk mempertahankan kedaulatan Iran sebagai negara Islam. Maka Iran dalam hal ini akan selalu berupaya untuk melawan ancaman yang mungkin ada dan yang menjadi ancaman terhadap Iran selama ini adalah Amerika Serikat dan Israel. Maka dalam keterlibatan Iran dalam konflik Suriah, tindakan Iran yang dapat dilihat sebagai cerminan dari nilai *Jihad* adalah segala upaya nyata Iran dalam memberikan bantuan militer kepada pemerintah Suriah untuk melawan pasukan oposisi yang dibantu oleh Amerika Serikat⁴⁷.

⁴⁴ *Loc.Cit.*

⁴⁵ Will Fulton, Joseph Holliday dan Sam Wyer.*Loc.Cit.*

⁴⁶ David Cook. *Understanding Jihad*. (London:University of California,2005).hal.1.

⁴⁷ Stanford. *Loc.Cit.*

Tabel 1.2 Variabel dan Indikator Martyrdom, Masalah dan Jihad

Variabel	Indikator
<i>Maslahah</i>	<ul style="list-style-type: none">● Upaya diplomatis Iran untuk menghentikan konflik Suriah
<i>Martyrdom</i>	<ul style="list-style-type: none">● Kesukarelaan rakyat Iran untuk ikut terlibat dalam konflik Suriah
<i>Jihad</i>	<ul style="list-style-type: none">● Pengiriman berbagai bantuan militer untuk Presiden Bashar Al-Assad● Perekrutan dan pembiayaan militan dari beberapa negara untuk bertempur di Suriah

1.6.2 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian jenis deskriptif. Penggunaan jenis penelitian deskriptif memungkinkan penulis untuk dapat mendeskripsikan suatu fenomena yang telah ada atau terjadi dan kemudian dapat menjelaskan permasalahan yang terdapat dalam fenomena tersebut serta hal yang melatarbelakanginya⁴⁸. Variabel yang digunakan

⁴⁸ W. Laurence Neuman. *Social Reseach Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. (Edinburg: Pearson Education Limited, 2014).hal.40.

dalam penelitian bisa hanya tunggal serta tidak terlalu membutuhkan adanya sebuah hipotesis. Dari penelitian deskriptif yang akan penulis kerjakan, diharapkan nantinya penulis dapat menjabarkan dengan jelas keterlibatan Iran dalam konflik Suriah berdasarkan dari nilai-nilai ajaran Islam *Syiah* sebagai salah satu bentuk budaya strategis Iran.

1.6.3 Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah proses penelitian serta agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, maka perlu ditentukan adanya suatu batasan masalah atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan terhadap nilai-nilai ajaran Islam *Syiah* sebagai salah satu sumber budaya strategis yang ada di Iran. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan ini juga hanya menfokuskan terhadap keterlibatan Iran dalam konflik yang terjadi di Suriah yang mendukung pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad dari tahun 2011 hingga tahun 2016. Tahun 2011 dipilih karena merupakan awal dari terjadinya konflik di Suriah. Dari tahun 2011 tersebut, konflik Suriah masih berlangsung hingga saat ini. Untuk mempermudah penelitian yang akan dilakukan, maka dari itu penulis menentukan tahun 2016 menjadi batas dari penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan gunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan berasal dari studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti dari berbagai buku, jurnal maupun artikel yang dianggap relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap objek yang ada dalam penelitian. Selain itu juga digunakan data-data dari kasus-kasus yang terjadi, artikel yang dimuat dalam media, maupun bentuk pernyataan lainnya dari pemerintah yang dimuat dalam media.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Untuk melakukan analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif⁴⁹. Dalam penggunaan teknik analisis kualitatif ini penulis akan menjelaskan hubungan antara nilai-nilai ajaran Islam *Syiah* sebagai sumber budaya strategis yang dimiliki oleh Iran yang berpengaruh terhadap keterlibatan Iran dalam konflik Suriah yang mendukung Presiden Bashar Al-Assad untuk mempertahankan kekuasaannya.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 bab. Pembagian bab tersebut akan penulis uraikan gambaran besarnya sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang tersusun atas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, landasan teori, hipotesis, metodologi penelitian yang terdiri dari definisi konseptual dan operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II Merupakan bagian dari penelitian yang berbicara tentang gambaran umum sejarah kemunculan sekte Islam *syiah* serta perkembangannya di negara Iran. Untuk memperjelas, dalam bab ini juga membahas bagaimana *syiah* sebagai suatu sekte dalam ajaran Islam dan *syiah* sebagai bentuk asal mula budaya strategis berdasarkan tiga nilai ajaran Islam yakni, *martyrdom*, *masalah* dan *jihad* Iran.

⁴⁹ *Ibid*.hal.477.

BAB III merupakan pembahasan mengenai peran *martyrdom*, *masalah* dan *jihad* sebagai budaya strategis Iran dalam konflik Suriah. Pembahasan yang disajikan berupa penjelasan bagaimana kemudian nilai nilai *martyrdom*, *masalah* dan *jihad* ini mempengaruhi serta mendorong Iran untuk terlibat dalam konflik yang terjadi di negara Suriah.

BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian serta saran